

Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Mendukung Pencapaian SDGs 4 di Provinsi Jawa Timur

Muhammad Dino Kurniawan¹, Abyan Gallardo Putra Prastyanto², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 25040674136@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674157@mhs.unesa.ac.id², indahprabawati@unesa.ac.id³, firressuprpto@unesa.ac.id⁴

Article received: 10 April 2026, Review process: 12 Mei 2026,

Article Accepted: 22 Juni 2026, Article published: 01 Juli 2026

ABSTRACT

Disparities in access to and quality of secondary education between urban and rural areas remain a structural challenge in achieving Sustainable Development Goals 4 (SDGs 4) at the regional level in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of policies to improve secondary education quality in East Java Province in supporting the achievement of SDGs 4, identify factors affecting implementation effectiveness, and assess the alignment between policy implementation and SDGs 4 indicators on access and quality dimensions. This study employed a qualitative approach with a library research design, utilizing policy documents, official government reports, and scientific literature published between 2015 and 2025, selected based on relevance and journal indexing standards SINTA. The analysis was conducted using George C. Edward III's implementation model, comprising four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Findings indicate that policy communication has been formally structured but remains unevenly distributed across regions. Resource distribution, particularly teacher allocation, shows a disparity of 21.18 percentage points between rural and urban areas. Institutional commitment at the provincial level has not been consistently translated across all implementation levels. Bureaucratic coordination remains constrained by the broad span of control following the transfer of authority. The implementation of secondary education quality improvement policies in East Java demonstrates partial alignment with SDGs 4 indicators, with measurable progress in education quality but persistent gaps in equitable access across regions.

Keywords: Policy Implementation, Secondary Education Quality, SDGs 4, Edward III Model, East Java

ABSTRAK

Ketimpangan akses dan mutu pendidikan menengah antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan struktural dalam pencapaian Sustainable Development Goals 4 (SDGs 4) di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian SDGs 4, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, serta menilai kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan indikator SDGs 4 pada aspek akses dan mutu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan, memanfaatkan dokumen kebijakan, laporan

resmi pemerintah, dan literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015–2025, dipilih berdasarkan relevansi dan standar indeksasi jurnal SINTA. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah terstruktur secara formal, namun belum merata antarwilayah. Distribusi sumber daya, khususnya guru, menunjukkan kesenjangan sebesar 21,18 poin persentase antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Komitmen institusional di level provinsi belum tersalurkan secara konsisten ke seluruh jenjang pelaksana. Koordinasi birokrasi masih terkendala rentang kendali yang luas pasca pengalihan kewenangan. Implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di Jawa Timur menunjukkan kesesuaian parsial dengan indikator SDGs 4, dengan kemajuan terukur pada aspek mutu namun kesenjangan akses antarwilayah yang masih persisten.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Mutu Pendidikan Menengah, SDGs 4, Model Edward III, Jawa Timur

PENDAHULUAN

Agenda pembangunan global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 mengenai pendidikan berkualitas, telah mendorong negara-negara berkembang untuk merestrukturisasi kebijakan pendidikan nasionalnya. Di Indonesia, komitmen terhadap SDGs 4 diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Nasional SDGs dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai landasan operasional kebijakan (Vioreza Dwi Yunianti, 2022). Implementasinya mencakup penguatan standar nasional pendidikan, peningkatan kompetensi guru, pemerataan akses, serta pembenahan tata kelola pendidikan (Kristen et al., 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memegang kewenangan strategis dalam pengelolaan pendidikan menengah, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi aktor kunci dalam menyelaraskan kebijakan mutu pendidikan dengan indikator SDGs 4 (Herawati, 2018).

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk dan satuan pendidikan terbesar di Indonesia, telah menetapkan pencapaian SDGs sebagai prioritas pembangunan daerah (Wardani Umi & Yoga Kundhani, 2023). Namun, ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di provinsi ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap capaian pembangunan daerah. Ketimpangan tersebut terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan kondisi faktual di lapangan (Puspitasari & Amirusholihin, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji intervensi pendidikan di Jawa Timur dari berbagai dimensi. Penelitian Effendy & Hertati (2024) menunjukkan bahwa program Kampus Mengajar berhasil meningkatkan literasi dasar siswa, namun temuan tersebut terbatas pada level satuan pendidikan dan tidak menganalisis dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan antarwilayah. Sedangkan telaah yang dilakukan Septaria et al. (2025) menekankan pentingnya

pelatihan komunitas guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, tetapi tidak mengaitkan hasil tersebut dengan capaian indikator SDGs 4 secara terukur. Studi Alya et al. (2024) mengkaji program pemberdayaan masyarakat dan bimbingan belajar yang terbukti meningkatkan partisipasi pendidikan di tingkat komunitas, namun analisisnya tidak mencakup dimensi kebijakan di atasnya. Sementara itu, Afia et al. (2023) berfokus pada peningkatan motivasi belajar peserta didik, yang relevan pada level mikro tetapi tidak menyentuh aspek tata kelola dan implementasi kebijakan provinsi. Kajian-kajian tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa intervensi yang ada masih bersifat parsial dan belum menghasilkan analisis yang menghubungkan faktor-faktor implementasi kebijakan dengan capaian SDGs 4 di tingkat provinsi.

Belum terdapat penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di tingkat provinsi dengan menggunakan kerangka model implementasi George Edward III, serta mengaitkannya secara langsung dengan capaian indikator SDGs 4 pada aspek akses dan mutu. Kekosongan pada level analisis ini menjadi celah penelitian yang relevan untuk diisi, mengingat kewenangan provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah yang cukup signifikan pasca desentralisasi.

Penelitian ini menggunakan model implementasi George Edward III yang mengidentifikasi empat variabel penentu efektivitas kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2016 dalam Asmawati, 2020; Mubarok et al., 2023; Wahab, 2012). Model ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis kinerja implementasi di lingkungan birokrasi yang terdesentralisasi, seperti pemerintahan daerah di Indonesia (Lukitasari et al., 2017; Rira Nuradhawati, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian SDGs 4, faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas implementasinya, dan sejauh mana kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan indikator capaian SDGs 4 pada aspek akses dan mutu pendidikan? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian SDGs 4.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian SDGs 4, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi berdasarkan model Edward III, serta menilai kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan indikator capaian SDGs 4 pada aspek akses dan mutu pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*), yang dipilih karena kesesuaiannya dengan tujuan

penelitian dalam menganalisis implementasi kebijakan berbasis dokumen dan literatur ilmiah. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Jawa Timur sebagai unit analisis kebijakan, dengan fokus pada pengelolaan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Subjek penelitian adalah kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan objek kajian mencakup dokumen kebijakan dan literatur ilmiah yang relevan. Dokumen kebijakan yang digunakan meliputi Peraturan Daerah, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan laporan kinerja daerah terkait pengelolaan pendidikan menengah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses identifikasi, seleksi, dan interpretasi data (*human instrument*), sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur pada basis data akademik Google Scholar dan portal SINTA. Standar pemilihan literatur mencakup empat kriteria: diterbitkan dalam rentang tahun 2015–2025, relevan secara substantif dengan topik implementasi kebijakan pendidikan, SDGs 4, atau mutu pendidikan menengah, bersumber dari jurnal yang terindeks SINTA untuk publikasi nasional, serta memiliki metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kriteria tersebut, beberapa sumber literatur digunakan sebagai bahan analisis utama, yang terdiri dari artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan resmi, dan laporan lembaga yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, pengelompokan informasi, dan interpretasi. Pada tahap reduksi, data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dieliminasi. Pada tahap pengelompokan, data diklasifikasikan berdasarkan empat variabel model implementasi George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada tahap interpretasi, pola implementasi kebijakan dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan indikator SDGs 4 pada aspek akses dan mutu pendidikan menengah. Keabsahan data ditingkatkan melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari dokumen kebijakan dan literatur ilmiah secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia mengalami pergeseran kewenangan yang mendasar melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan urusan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sejak 1 Januari 2017. Pengalihan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan menengah yang lebih sistematis sekaligus mereduksi fragmentasi kebijakan (Muhdi et al., 2017).

Berdasarkan data yang dihimpun, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur diemban oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang didukung Cabang Dinas Pendidikan di 38 kabupaten/kota sebagai unit

pelaksana teknis (Pergub Jatim No. 59/2018;Dindik, 2025). Temuan menunjukkan bahwa program peningkatan mutu yang dijalankan mencakup pelatihan guru berkala, penguatan sarana prasarana, digitalisasi layanan pendidikan, perluasan akses melalui PPDB berbasis zonasi, serta 116 inovasi digital pendidikan pada periode 2023–2025 (Ghaisani et al., 2026). Keseluruhan kebijakan tersebut bersinggungan dengan target SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan pada tahun 2030 (Bappenas, 2020).

Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Berdasarkan Model Edward III

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur dapat dianalisis menggunakan model George C. Edward III melalui empat variabel penentu keberhasilan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut bekerja secara simultan, sehingga kelemahan pada satu variabel berpotensi menghambat efektivitas keseluruhan implementasi (Widodo, 2021).

Komunikasi Data menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah menyebarkan kebijakan melalui surat edaran resmi, petunjuk teknis, dan rapat koordinasi berjenjang yang melibatkan kepala Cabang Dinas, pengawas sekolah, dan kepala satuan pendidikan, termasuk sosialisasi kebijakan PPDB 2024 yang mencakup seluruh Cabang Dinas. Hal ini mengindikasikan adanya upaya transmisi kebijakan yang terstruktur secara formal. Namun, temuan menunjukkan bahwa transmisi informasi belum merata antara satuan pendidikan di wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kondisi tersebut mengonfirmasi bahwa cakupan wilayah yang lebih luas menciptakan tantangan koordinasi struktural yang tidak dapat diatasi hanya melalui perbaikan prosedur (Ngongira & Iriani, 2020). Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III (1980) bahwa kejelasan dan konsistensi transmisi pesan merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber Daya Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi guru antarwilayah masih menjadi persoalan struktural utama dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari data BPS (2023) yang menunjukkan selisih 21,18 poin persentase antara penduduk pedesaan (27,98%) dan perkotaan (49,16%) dalam penyelesaian pendidikan menengah. Kesenjangan kompetensi guru antara kedua wilayah tersebut dikonfirmasi oleh BSKAP Kemendikbudristek (2023), sementara temuan Triwiyanto & Kusumaningrum (2025) menunjukkan bahwa tantangan geografis dan lemahnya kebijakan penempatan guru turut memperburuk rasio guru-siswa di wilayah terpencil. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi sumber daya pendidikan belum merata, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III bahwa tanpa distribusi sumber daya yang proporsional, kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan menghasilkan perubahan yang terukur di lapangan.

Disposisi (Sikap Pelaksana) Temuan penelitian menunjukkan bahwa komitmen institusional Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercermin dari program pelatihan guru melalui UPT PTKK yang melayani lebih dari 1.950 SMK serta mekanisme Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) (Nihe et al., 2025). Hal ini mengindikasikan adanya keseriusan pada level pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan. Namun, temuan menunjukkan bahwa beban administrasi yang tinggi kerap mengurangi fokus guru dan kepala sekolah terhadap substansi peningkatan mutu (Rosari et al., 2023), sehingga satuan pendidikan dengan kapasitas terbatas cenderung mengimplementasikan kebijakan secara prosedural. Kondisi tersebut mempertegas pandangan Edward III bahwa disposisi positif di level pemerintah tidak secara otomatis tersalurkan ke seluruh jenjang pelaksana.

Struktur Birokrasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi pendidikan menengah di Jawa Timur telah diatur melalui Pergub Jawa Timur No. 59 Tahun 2018, diperkuat dengan pembentukan UPT di tingkat kabupaten/kota sejak 2017 (Muhdi et al., 2017). Temuan menunjukkan bahwa struktur formal yang ada belum menjamin koordinasi yang efektif dalam implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor lintas wilayah (Widodo, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh tantangan koordinasi yang bersifat inheren pasca pengalihan kewenangan ke provinsi (Ngongira & Iriani, 2020), sehingga kapasitas pengawasan satuan pendidikan cenderung tidak seragam antarwilayah. Hal ini sejalan dengan argumen Edward III bahwa fragmentasi struktural tanpa mekanisme koordinasi yang kuat dapat menghambat konsistensi implementasi.

Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh faktor struktural yang berkaitan dengan kompleksitas tata kelola pasca pengalihan kewenangan. Berdasarkan data yang dihimpun, pengelolaan lebih dari 3.000 SMA/SMK di 38 kabupaten/kota menuntut pengembangan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan prosedur teknis (Muhdi et al., 2017). Dalam sistem desentralisasi pendidikan, rentang kendali yang luas tanpa dukungan sumber daya yang proporsional terbukti menghasilkan variasi implementasi yang signifikan antarsatuan pendidikan (Ngongira & Iriani, 2020).

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi guru bersifat kumulatif akibat kelemahan sistem data pendidikan dan kondisi geografis (Triwiyanto & Kusumaningrum, 2025). Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa sekolah yang kekurangan guru berkualifikasi tidak hanya mengalami defisit pembelajaran, tetapi juga kehilangan kapasitas untuk mengadaptasi kebijakan provinsi secara substantif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan distribusi sumber daya manusia berdampak berlapis pada kualitas implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan kajian dokumen, belum optimalnya sinkronisasi antara program nasional seperti Kurikulum Merdeka, Dana BOS, dan PIP dengan kapasitas adaptif sekolah dan dukungan teknis daerah (Effendy & Hertati, 2024; Elya Septiani, 2024)

menyebabkan program berisiko berjalan secara simbolik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan sistemik yang mempertimbangkan kapasitas nyata satuan pendidikan di berbagai wilayah diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang terukur.

Kesesuaian Implementasi Kebijakan dengan Target SDGs 4

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan perluasan akses melalui kebijakan zonasi PPDB dan jalur afirmasi berbasis KIP, PKH, dan DTKS (Dindik, 2025), ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini terlihat dari selisih 21,18 poin persentase lulusan pendidikan menengah antara kedua wilayah (BPS, 2023), yang mengindikasikan bahwa hambatan akses bersifat struktural dan tidak dapat diatasi hanya melalui kebijakan afirmasi berbasis administrasi (Bappenas, 2020; Difa Ananda, 2025).

Temuan menunjukkan bahwa program PKB dan pelatihan guru melalui UPT PTKK telah menunjukkan keselarasan dengan indikator SDGs 4 yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pendidik (Elya Septiani, 2024; Nihe et al., 2025). Namun, digitalisasi pendidikan masih terkendala infrastruktur yang tidak merata antardaerah. Kondisi ini berpotensi menghasilkan kesenjangan output yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam SDGs 4 (Kemendikbudristek, 2023).

Sintesis Pembahasan

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa dari keempat variabel model Edward III, sumber daya dan koordinasi birokrasi merupakan aspek paling determinan dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari ketimpangan distribusi guru dan fasilitas yang berimplikasi langsung pada kualitas pembelajaran dan konsistensi implementasi di tingkat sekolah (Elya Septiani, 2024; Rosari et al., 2023), sementara ketidakmerataan distribusi akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan menjadi penyebab utama disparitas yang menghambat capaian program pemerintah (Asmawati, 2020).

Temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan pada dimensi sumber daya terbukti melemahkan dimensi lainnya secara bersamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusional pada seluruh jenjang birokrasi pendidikan merupakan agenda strategis yang mendesak dalam mendukung pencapaian target SDGs 4 di Provinsi Jawa Timur.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian SDGs 4 telah menunjukkan upaya sistematis yang tercermin dari berbagai program seperti pelatihan guru melalui UPT PTKK, digitalisasi layanan pendidikan, dan perluasan akses melalui kebijakan zonasi PPDB. Namun, efektivitas implementasi

masih menghadapi kendala struktural yang signifikan pada keempat variabel model Edward III. Pada dimensi komunikasi, transmisi kebijakan belum merata antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Pada dimensi sumber daya, ketimpangan distribusi guru dan infrastruktur digital menjadi hambatan paling determinan, sebagaimana tercermin dari selisih 21,18 poin persentase lulusan pendidikan menengah antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada dimensi disposisi, komitmen institusional di level pemerintah provinsi belum tersalurkan secara konsisten ke seluruh jenjang pelaksana, sementara pada dimensi struktur birokrasi, rentang kendali yang luas pasca pengalihan kewenangan belum didukung oleh mekanisme koordinasi yang memadai. Secara keseluruhan, kesesuaian antara implementasi kebijakan dan indikator SDGs 4 masih bersifat parsial, di mana aspek mutu pendidikan menunjukkan kemajuan yang lebih terukur dibandingkan aspek pemerataan akses antarwilayah.

Penguatan kapasitas institusional pada seluruh jenjang birokrasi pendidikan, perbaikan sistem distribusi guru berbasis data, dan sinkronisasi program nasional dengan kapasitas nyata satuan pendidikan di daerah merupakan agenda yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan menengah dengan pendekatan komparatif antara provinsi, atau menggunakan metode campuran yang mengintegrasikan data primer dari aktor pelaksana kebijakan di lapangan, guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dalam mendukung pencapaian target SDGs 4 pada tahun 2030.

DAFTAR RUJUKAN

- Afia, N., Muzdalifah, L., Firdausi, N., Wigati, T., & Kristina, D. G. (2023). Peningkatan Motivasi Belajar melalui Kegiatan Bimbingan Gratis di Desa Tulangan untuk Mencapai SDG's Poin ke-4 Pendidikan Berkualitas. *Nusantara Community Empowerment Review*, 1(2), 87-94. <https://doi.org/10.55732/ncer.v1i2.977>
- Alyaa, N., Mufazzal, M. R., Valentino, D., Kusuma, A. S., & Nuryani, A. F. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bimbingan Belajar Anak dan Pendidikan Orang Tua untuk Mencapai Tujuan SDGs 4 di Desa Mulyoasri Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(2), 2764-2771. <https://doi.org/10.59837/szstwm94>
- Asmawati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 8-17. <https://doi.org/10.51817/prj.v8i1.201>
- Bappenas. (2020). PENDIDIKAN BERKUALITAS. Retrieved from <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-4/>
- BPS. (2023). *Cover Depan i* | .
- Difa Ananda. (2025). Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI). *Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, 3(1), 39-54.
- Dindik. (2025). *Juknis SPMB Jatim Tahun Ajaran 2025*. Retrieved from

- <https://spmbjatim.net/informasi/ketentuan/>
- Effendy, A. D., & Hertati, D. (2024). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 48–62. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3178>
- Elya Septiani. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Teori Edward III di SD Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3. Retrieved from <https://al-haramjournal.id/index.php/JIM/article/view/4781/3870>
- Ghaisani, S., Asiza, N., & Manggalou, S. (2026). *Analisis Inovasi Digital Kebijakan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2025*. 4, 204–220.
- Herawati, N. R. (2018). Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 72. <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.72-93>
- Joko Widodo. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=1zQXEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Analisis+Kebijakan+Publik:+Konsep+dan+Aplikasi+Analisis+Proses+Kebijakan+Publik.+Malang:+Bayumedia+Publishing.&ots=NkO-Xa06rJ&sig=bJ5Flp-syYWSuMoHLysfgJSyFhI&redir_esc=y#v=onepage
- Kristen, U., Wacana, S., Atika, B. P., Sma, T., Semarang, K., & Iriani, A. (2018). *Kelola Jurnal Manajemen Pendidikan FKIP Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah*. (5), 165–176.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>
- Mubarok, A. W., Alfiyatun, Sulistia, D. S., & Nurwahidah, I. (2023). Kebijakan Sentralisasi dan Manajemen Straregik dalam Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 188–195. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.190>
- Muhdi, M., Kastawi, N. S., & Widodo, S. (2017). Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145>
- Ngongira, S. O., & Iriani, A. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi ke Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Mengelola Pendidikan Menengah. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(3), 173–181. <https://doi.org/10.17977/um025v4i32020p173>
- Nihe, A. S., Purwoko, B., & Hazin, M. (2025). Implementation of the Policy for Strengthening Teacher Competence through Continuous Competence Development (PKB) Based on East Java Governor Regulation No. 38/2024 in

-
- Surabaya. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 13(2), 194–201.
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i2.1829>
- Puspitasari, A. R., & Amirusholihin, A. (2025). Pengaruh Ketimpangan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 7737–7746.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1925>
- Rira Nuradhawati. (2019). *Dinamikasentralisasidandesentralisasidiindonesia*. 2(1), 152–170.
- Rosari, U. S., Albab, U., & Suroso. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Surabaya. *Jurnal Soetomo Administrasi Publik*, 1(2), 81–94.
- Septaria, K., Fatharani, A., Sholihin, M., Kholiq, A., Zamroni, M. R., Hendratmoko, A. F., ... Leksana, D. M. (2025). Peningkatan Kualitas Guru Melalui Komunitas: Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Untuk Mendukung SDGs-4. *Jurnal Abdimas Terapan*, 4(2), 76–89. <https://doi.org/10.56190/jat.v4i2.84>
- Triwiyanto, T., & Kusumaningrum, D. (2025). Ketimpangan Distribusi Guru Sekolah Dasar Negeri dan Pemerataan Akses Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 188–214. <https://doi.org/10.52316/jap.v21i2.607>
- Vioreza Dwi Yunianti, D. R. A. O. S. (2022). Jurnal basicedu. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Retrieved from <https://simpus.mkri.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&ruas=Pengarang&bahan=1&katakunci=Solichin Abdul Wahab>
- Wardani Umi, M., & Yoga Kundhani, E. (2023). Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE). *Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie)*, 5(2), 247–261.